

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran.

Pada situasi tertentu akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Newkirk (1986: 23) dalam Syahrida (2009) menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing-masing satuan kerja perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mardiasmo (2004:35) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula pengelolaan keuangan yang baik pula.

Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah.

Adanya peran internal audit dalam melaksanakan pengawasan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrida (2010) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa Pemahaman akuntansi dan peran internal pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah pemerintah Daerah harus melakukan Tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan optimal. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian. Karena penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintah itu sendiri. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan., akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan dan dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat kemampuan pemerintah daerah Provinsi NTT dalam memahami daerahnya serta bagaimana pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi kinerja instansi Pemerintah daerah Terutama pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan Mengangkat Judul :

“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat di rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana gambaran deskriptif tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan pengendalian Internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPPKAD Provinsi NTT.
2. Apakah Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan keuangan Daerah Pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Apakah Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan keuangan Daerah Pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui gambaran deskriptif tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPPKAD Provinsi NTT.

2. Manfaat penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan maupun manfaat bagi :

- a. Memberikan informasi tambahan kepada mahasiswa mengenai Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Menambah ilmu dan materi mengenai Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi dan Universitas.
- b. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan Pengendalian internal untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.